www.balesio.com
Optimized using
Trial Version

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika, Jakarta

Abdullah Marlang,2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Aminuddin Salle, Makassar.

Abu Daud Bosroh, 2017, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,* STHI "IBLAM", Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Aminuddin Ilmar, 2020, *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan,* Phinatama Media, Makassar.

Andi Abu Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book And Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Yang Akurat Dalam Menggapai Kebenaran Bermuatan Keadilan*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter,* Rajawali Pers, Jakarta.

Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik, dan Pemilu,* Rangkang Education, Yogyakarta.

Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Regulasi. Kompensasi. Penegakan Hukum,* Margaretha Pustaka, Jakarta.

Dewa Gede Satriawan, *et.al*., 2021, *Tata Hukum Indonesia*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.

Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* SinarGrafika, Jakarta.

www.balesio.com
Optimized using
Trial Version

Irwansyah,2020, *Kajian Ilmu Hukum,* Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Mitra Buana Media, Yogyakarta.

Jefry Tarantang, 2018, *Advokat Mulia/ Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, K-Media, Yogyakarta

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan*, Visimedia, jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kasman Abdullah, 2019, Disertasi; *Hakikat Izin Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara (The Essense of License in State Wealth Management)*

L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan,*2012, Setara Pers, Malang.

M. Arfin Hamid,2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia),* PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, 2017, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok.

M. Yahya Harahap,2008, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mas Bakar, 2010, *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi,* Rangkan Education, Yogyakarta.

www.balesio.com
Optimized using
Trial Version

Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam (Pengantar dan Tata Hukum Indonesia),* Rajawali Pers, Jakarta.

Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, 2017, *Ilmu Negara,*Gaya Media Pratama, Jakarta.

Muhammad Adiguna Bimasakti, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah/ onrechtmatige overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Pergeseran Paradigma dan Kompetensi Absolut OOD, dan Hukum Acara OOD Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan),* Deepublish, Yogyakarta.

Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma & Muhammad Adiguna Bimasakti, 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi),* KENCANA, Jakarta.

Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,* PT Citra Aditya Bakri, Bandung.

Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in democratiche rechtstaat),*Sinar Grafika, Jakarta.

Pedoman Penulisan Disertasi, 2020, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon *et.al.* 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers, Jakarta.

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum,* SinarGrafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S., 2008, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* Sinar Grafika, Jakarta.

www.pdfesio.com
Optimized using
Trial Version

SF Marbun dan Moh Mahfud MD,2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,* Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* PT Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah,* CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty , Yogyakarta

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* PT Rajawali Pers, Depok.

W. Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinara Grafika, Jakarta.

W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, PT Eresco.

Willy D.S. Voll, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* Sinar Grafika, Jakarta.

Zairin Harahap, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* perubahan keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zairin Harahap, 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* perubahan kesembilan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung, Rajawali Pers, 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN RI No.73 Tahun 1985.

www.balesio.com
Trial Version
Optimized using

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN RI No.35 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN RI No.160 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN RI No. 157 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. LN RI No.292 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia LN RI No.165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. LN RI No. 139 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. LN RI No.75 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN RI No.73 Tahun 1985.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN RI No.9 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN RI No.3 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. LN RI No.139 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara. LN No. 52 Tahun 1991.

www.pdfesio.com
Optimized using
Trial Version

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtsmatig Overheidsdaad).*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

URL/Website/Artikel Jurnal:

https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2019_TF_G_230_putusan_akhir.pdf /diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

www.pdfesio.com
Optimized using
Trial Version

nttps://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3bcd36870ee265f1ea79666c67a53278.html /diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

News.detik.com /Sabtu, 13 maret 2021, 05:52 WIB/ diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

News.detik.com /Minggu 21 Juni 2020, 14:12 WIB/ diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

Watung, M. (2018). ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD DALAM PRAKTEK PERADILAN NEGARA HUKUM INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt. G/2015/PN. Mnd Tanggal 19 Mei 2016). *LEX ET SOCIETATIS*, *6*(1). hlm.50. / diakses pada tanggal 19 April 2021.

Agus Salim & Elfran Bima Muttaqin, *Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara,* Paulus Law Journal, Volume 2 Nomor 1, September 2020

APRIANI, T. (2019). KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA. *GANEC SWARA*, *13*(1), 43-49.

https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product

https://peraturan.bpk.go.id/Home

https://www.bphn.go.id/data/documents/perbuatan_melawan_hukum_oleh_penguasa_dalam_era_otonomi_daerah.pdf

http://repository.unissula.ac.id/30977/1/10302000348.pdf

http://repository.unika.ac.id/17876/1/0-Cover.pdf

http://repository.unair.ac.id/32478/

https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/#_ftn3

Wereh, A. C. (2017). *Reformulasi Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Pasif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

www.balesio.com
Optimized using
Trial Version

nttps://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=309 / Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis),* hlm.1. / diakses pada tanggal 19 April 2021.

Sari, I. (2021). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, *11*(1). /diakses pada tanggal 18 April 2021.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/#:~:text=1.,dengan%20hukuman%20oleh%20undang%2Dundang. /diakses pada tanggal 17 April 2021.

https://www.kompasiana.com/061_destara4149/6398f58708a8b534d378f364/keabsahan-tindakan-pemerintah

http://digilib.uinsby.ac.id/19758/46/Bab%202.pdf, Hlm.21, diakses pada hari jumat tanggal 27 agustus tahun 2021.

Enrico Parulian Simanjuntak, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018.

Barokah, Muhamad Raziv and Erliyana, Anna (2021) "PERGESERAN KOMPETENSI ABSOLUT DARI PERADILAN UMUM KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA: GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 51: No. 4, Article 1. DOI: 10.21143/jhp.vol51.no4.3290

Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, *2*(1), 19-39.

Situmorang, S. F. (2019). Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, *4*(1), 25-36

Soetrisno, D. (1973). *Onrechtmatige Overheidsdaad* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). hlm.14.

Optimized using
Trial Version
www.balesio.com

Susilo, A. B. (2013). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(2), 291-308.

Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, *1*(2), 99-113.

Tjandra, W. R. (2016). Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *20*(3), 423–439. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art5

(Koswara, A. (2021). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN DAN PENGAJUAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DAN PP NOMOR 44 TAHUN 2008. *Doctrinal*, *6*(1).

Mustamu, J. (2011). Diskresi dan tanggungjawab administrasi pemerintahan. *Sasi*, *17*(2), 1-9/diakses pada hari jumat tanggal 20 agustus tahun 2021

Bimasakti, M. A. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, *1*(2), 265-286.

Sufriadi, S. (2017). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *1*(1), 57-72/Diakses pada hari jumat tanggal 20 agustus tahun 2021

PRAKOSO, R. T. A. (2019). *TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK LUMPUR LAPINDO* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Renius Albert Marvin & Anna Erliyana, *Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara*,2019, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 49 Nomor 4.

Fuad, A. B. (2020). Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara. *Supremasi Hukum*, *9*(2).diakses pada hari sabtu tanggal 21 agustus tahun 2021

www.balesio.com
Optimized using
Trial Version

Malaka, Z., & Adjie, H. Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012). *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Al-Qanun*, *20*(2).